

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pelayanan Masyarakat Desa Sungai Liput Dusun Buluh Betong Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Sonny M. Ikhsan Mangkuwinata^{1*}, Haryani Haryani¹, Denny Sumantri Mangkuwinata¹, Putri Aselia², Cut nadia Fitriana², Riski Al Kausar²

¹ Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Almuslim Bireuen -Aceh

² Mahasiswa Universitas Almuslim Bireuen -Aceh

) email: sonnymangkuwinata442@gmail.com

DOI:
10.51179/ajce.v4i1.3285

Article history

Received:
April 20, 2025

Revised:
April 24, 2025

Accepted:
April 27, 2025

Key Word:
*Technical Guidance,
Governance, fFinancial
report, Service*



© 2023

Oleh authors. *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)*. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT: Village government organizations are currently required to have good governance management in preparing financial reports and services, and this is very important to implement in protecting the needs of village communities. Therefore, the ability of village officials to manage governance, especially in providing services to the community, is a necessity. This knowledge and ability are very much needed to support the performance of public services at the Sungai Liput Village Office, Buluh Betong Hamlet, Kejuruan Muda District in Aceh Tamiang. With good service governance and the ability of caring village government human resources, transparent and accountable governance will be created as well as easy, fast, and accurate services so that the community can be comfortable in interacting. Therefore, this Technical Guidance activity aims to improve scientific understanding and skills, especially regarding governance and service management for local Village Apparatus.

ABTRAK: Organisasi pemerintahan desa saat ini dituntut memiliki manajemen tata kelola dalam menyusun laporan keuangan dan pelayanan yang baik, dan hal ini sangat penting untuk diterapkan dalam mengayomi kebutuhan masyarakat desa. Oleh karenanya kemampuan aparatur desa dalam memanaj tata kelola, khususnya memberikan pelayanan pada masyarakat suatu keniscayaan. Pengetahuan dan kemampuan tersebut sangat diperlukan sebagai penunjang kinerja pelayanan publik di Kantor Desa Sungai Liput Dusun Buluh Betong Kecamatan Kejuruan Muda di Aceh Tamiang. Dengan tata Kelola pelayanan yang baik dan kemampuan SDM pemerintah desa yang peduli akan tercipta tata Kelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan yang mudah, cepat, dan cermat sehingga masyarakat dapat nyaman dalam berinteraksi. Maka kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keilmuan dan keterampilan khususnya tentang manajemen tata kelola dan pelayanan bagi Aparatur Desa setempat.

PENDAHULUAN

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik tidaklah mudah, terutama dengan kemajemukan masyarakat yang ada saat ini. Namun, organisasi seperti juga kantor pemerintahan desa, dapat menghadirkan pelayanan prima selama mengetahui konsep dan apa yang harus dilakukan. Sistem pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Untuk mencapai proses tersebut upaya pemerintah salah satunya adalah memberikan dana desa yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudianto, 2017). Dalam hal ini secara otomatis dituntut bagi para aparatur desa memiliki kemampuan melakukan tata kelola, baik dalam membuat laporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel, juga melakukan pelayanan terbaik pada kebutuhan masyarakat di desanya.

Arah pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi sebenarnya sudah tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memiliki prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan (Perpres RI No.95, 2018). Namun dalam implementasinya belum sampai sepenuhnya hingga ke tingkat Desa. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan belum meratanya jaringan internet (Arianto, 2018; Mayowan, 2016).

Rendahnya tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman dari aparatur Desa menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM di Desa (Mangindaan & Manossoh, 2018). Kondisi ini juga terjadi di desa-desa di Dusun Bbuluh Betong kecamatan kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang. Aminah & Sutanto (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kapasitas aparatur desa, khususnya pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan meskipun sudah tergolong cukup namun belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Juga kinerja keuangan dengan kompetensi aparatur di desa, perlu terus diberi pembinaan, baik dalam kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan atau pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan, mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran desa yang di harapkan transparan dan akuntabel. Karena sering kali persoalan ini terjadi di desa tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh aparatur pelaksana desa di bidang itu. Sehingga terjadi kasus penyelewengan keuangan desa atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa agar pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin dalam anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa harus diimbangi dengan aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satu azasnya yaitu akuntabilitas. Karena kemajuan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (Chomariyah et al., 2016). Penelitian Medianti, (2018) menemukan dengan adanya kompetensi Aparatur Desa, serta komitmen yang tinggi akan mampu membuat partisipasi masyarakat dalam memajukan desa, terutama ikut mengevaluasi laporan keuangan desa.

Untuk bisa meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri, maka Pemerintah Desa perlu didukung oleh sumber daya manusia aparatur Desa yang memadai. Cara yang dapat dilakukan berupa pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan bagi aparatur desa. Bidang keahlian yang perlu terus menerus ditingkatkan antara lain; 1) Keahlian Manajemen Tata Kelola, 2) Keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam menyusun laporan keuangan, 3) Kemampuan pelayanan public, 4) Keahlian dalam bidang teknologi (TIK), karena saat ini semua berbasis komputer dalam kerja administrasi pengembangan desa. Untuk bidang manajemen tata kelola, keuangan dan pelayanan publik tentunya akan memerlukan tim yang mumpuni untuk berbagi pengetahuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan manajemen tata kelola, kemampuan menyusun laporan keuangan desa, dan pelayanan publik dapat mendukung perkembangan kemajuan desa.

Laporan keuangan desa adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan desa, termasuk pendapatan, belanja, dan aset. Laporan ini disusun oleh pemerintah desa dan disajikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Laporan keuangan desa juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa. Sesuai dengan perkembangan jaman, Laporan keuangan desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam

Neraca. Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa.

Maka bimbingan teknis yang dilaksanakan di Desa Sungai Liput Dusun Buluh Betong Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, akan sangat bermanfaat pada aparatur pelaksana kerja desa tersebut.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) mulai dari pemberian pengarahan dan presentasi serta praktik membuat laporan keuangan sesuai pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Strateginya juga melalui pendampingan, dengan beberapa tahapan.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan yang non-permanen yang hanya dilakukan satu kali saja namun berkelanjutan berupa pendampingan jika para aparatur desa memerlukan untuk berkonsultasi. Kegiatan diawali dengan menganalisis kebutuhan para Aparatur Desa Sungai Liput Dusun Buluh Betong kecamatan Kejuruan Maju Aceh Tamiang, yang sedang melakukan pengembangan potensi desa termasuk potensi sumber daya manusia (aparatur desa) dalam upaya peningkatan tata Kelola baik Menyusun laporan keuangan desa dan layanan publik desa untuk memberikan rasa nyaman masyarakat desa. Karena dengan banyaknya pelayanan yang harus dilakukan serta tuntutan kecepatan dan ketepatan pelayanan kantor desa maka diperlukan aspek manajemen tata kelola yang efektif dalam melakukan seluruh proses tersebut, salah satunya adalah manajemen tata kelola yang tentunya harus didukung oleh sikap layanan publik yang baik dan benar (*Excellent*) baik dari pelayanan secara administratif dan praktik pelayanan langsung.

Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode bimbingan teknis. Metode bimbingan teknis dilakukan karena untuk materi ini memerlukan praktik secara teknis dan langsung sehingga metode bimbingan teknis ini dianggap efektif dalam waktu yang relatif tidak panjang namun dapat memberikan solusi yang optimal atas minimnya pengetahuan para aparatur desa setempat mengenai manajemen tata Kelola, penyusunan laporan keuangan dan *service excellent*.
2. Bimbingan teknis ini juga diberikan modul tersendiri dan presentasi menggunakan slide yang langsung diperagakan untuk memperjelas materi.
3. Pengarahan dan presentasi materi dengan memberi modul contoh manajemen tata Kelola, yang dilanjut format dan Teknik laporan keuangan, serta system pelayanan prima, dibarengi dengan diskusi.
4. Pemberian latihan praktik laporan keuangan berbasis akuntansi. Yang pelaksanaan kegiatan dua hari penuh yakni Sabtu dan Minggu pada tanggal 18-19 Januari 2029 di kantor desa Sungai Liput tersebut.
5. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) pengabdi sebagai instruktur yakni Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Almuslim, yang dibantu oleh tiga mahasiswanya.
6. Instrumen untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis menggunakan kuisioner, diberikan sebelum melaksanakan bimbingan teknis (*pre-test*) dan setelah bimbingan teknis (*Post-test*).
7. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini juga dilakukan konsultasi dan pendampingan yang diawali dengan proses wawancara dan diskusi, sehingga pengabdi mengetahui secara pasti kemampuan aparatur tersebut.



Gambar 1. Di Kantor Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian dosen dan mahasiswa di desa Sungai Liput Dusun Bukuh Betong kecamatan Kejuruan Maju kabupaten Aceh Tamiang ini dapat terlaksana secara baik dan mendapat respon dari apaturur atau pelaksana desa bagian Menyusun laporan keuangan dan pelayanan dalam menjalankan tata kelola kantor desa, dan masyarakat setempat khususnya yang membutuhkan informasi, dan pelayanan di pemerintahan desa tersebut. Bimtek diikuti sejumlah 7 peserta, dan hal yang dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Hasil dari Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pengamatan secara observasi kualitatif tentang penyusunan laporan keuangan dan pelayanan prima di Kantor Desa.
- 2) Dalam penilaian kualitatif awal berdasarkan pengamatan tim dan juga hasil diskusi dengan pimpinan desa setempat didapatkan hasil bahwa masih banyak sekali pegawai atau aparatur desa yang tidak dapat melakukan manajemen tata kelola sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai sistem akuntansi dan pelayanan secara prima dengan baik dan benar. Dari hasil kegiatan ini ada beberapa hal yang akhirnya ditemukan oleh tim bahwa aparatur desa setempat memperoleh informasi baru dari hasil bimbingan tim seperti misalnya langkah tata kelola yang baik dan benar, performa personal, penggunaan ICT, Teknik penyusunan laporan keuangan dan sistem melayani dan beberapa hal lainnya sehingga pimpinan desa setempat berupaya agar materi yang telah diberikan tersebut dapat diterapkan.
- 3) Adapun dalam proses penerapannya saat ini baik pimpinan dan aparatur desa setempat saling mengevaluasi secara kualitatif agar dapat memberikan pelayanan yang terus meningkat dan semakin baik.
- 4) Hasil evaluasi kegiatan, dideskripsikan berikut ini:

Tabel 1. Respon Peserta dengan kegiatan Bimbingan Teknis

No	Uraian	Respon Peserta (Dari kurang sampai sangat Baik)				
		1	2	3	4	5
1	Jenis materi sesuai kebutuhan	0,00%	0,00%	14,29%	42,86%	42,86%
2	Waktu pelaksanaan memadai	14,29%	28,57%	57,14%	0,00%	0,00%
3	Kemampuan Narasumber	0,00%	0,00%	0,00%	57,14%	42,86%
4	Interaksi narasumber dengan peserta	0,00%	14,29%	14,29%	42,86%	28,57%
5	Peserta puas dengan pelaksanaan bimtek	0,00%	14,29%	14,29%	28,57%	42,86%
6	Ada perubahan kemampuan peserta setelah mengikuti Bimtek	0,00%	0,00%	28,57%	42,86%	28,57%
7	Peserta menginginkan bimtek ini bisa dilakukan periodik/kontinu	0,00%	0,00%	0,00%	57,14%	42,86%

Dari tabel diatas, secara umum peserta menilai materi sesuai namun waktu tidak memadai. Sedangkan para pemberi materi dinilai punya kemampuan dan ahli sehingga peserta merasa puas terhadap penyajian materi dan interaksi dengan para narasumber. Sebagian besar berharap bimtek dapat dilanjut di lain waktu.

Dan evaluasi kemampuan peserta yang dinilai tim pengabdi berikut ini:

Tabel 2. Evaluasi Kemampuan Peserta setelah Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis

No	Uraian	Tingkat Kemampuan				
		Kurang	Cukup	Sedang	Baik	Sangat baik
1	Keaktifan peserta mengikuti Bimtek	0,00%	0,00%	28,57%	42,86%	28,57%
2	Pengetahuan Manajemen tata Kelola	0,00%	0,00%	28,57%	28,57%	42,86%
3	Tingkat Pemahaman membuat Lap keuangan	0,00%	0,00%	14,29%	28,57%	57,14%
4	Pemahaman mengenai pelayanan Prima	0,00%	0,00%	14,29%	42,86%	28,57%
5	Interaksi dalam diskusi dan bertanya	0,00%	0,00%	14,29%	28,57%	57,14%
6	Kemampuan menggunakan ICT	0,00%	14,29%	14,29%	28,57%	42,86%

Dari tabel diatas, secara umum peserta ada perubahan pengetahuan dan kemampuan, namun dalam hal menggunakan ICT masih lemah. Diskusi dan tanya jawab aktif dilakukan antara peserta dan narasumber (pemateri). Semoga apa yang diberikan menambah pengetahuan/kemampuan dan prilaku aparatur bahwa pentingnya menguasai tata Kelola pemerintahan desa yang baik.



Gambar 2. Foto Bersama setelah kegiatan Bimtek di Desa Sungai Liput
Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta rencana tahapan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa aparatur Desa Sungai Liput Dusun Buluh betong di kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menata kantor pemerintahan desa secara profesional dengan kemampuan menggunakan teknologi (ICT) mampu menyusun laporan keuangan desa lebih lengkap sesuai system akuntansi yang akuntabel.

Disamping itu kemampuan dan kepedulian apatarur desa menerapkan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga dirasa penting. Maka bimbingan teknis ini setidaknya memberi motivasi lebih lanjut dalam menjalankan tugas sesuai rupoksi dan amanat Undang – Undang Desa.

Selain itu, Desa juga memerlukan aparatur desa yang mengoperasikan komputer dengan baik sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan desa dan menjalankan pelayanan prima.

Juga dari kegiatan bimtek dan temuan dilapangan, disarankan bagi Pemerintah Desa, penambahan aparatur desa untuk mengelola dan melakukan pencatatan keuangan desa, disamping itu diperlukan perbaikan dan penambahan perangkat komputerisasi yang handal sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa dapat dilakukan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Arianto, I. D. (2018). Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Jombang. Dinamika Governance: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 59–65. <https://doi.org/10.33005/jdg.v8i1.1216>
- Chomariyah, Ariyanto, B., & Hudi, N. (2016). *Keuangan Desa Pesisir*. Malang: Inteligensia Media.
- Larastika Medianti, (2018) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1 (1), 56-67.
- Mangkuwinata, S. M. I., Haryani, H., Mangkuwinata, D. S., Zahara, M., Akbar, M., & Ulhusni, A. (2024). Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Desa Suka Ramai Atas Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Benar Meriah. *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)*, 3(2), 8–14. <https://doi.org/10.51179/ajce.v3i2.2816>
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(01), 14–23. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2>
- Rintok Juhirman (2021). Laporan Keuangan Desa Dari Basis Kas Menuju Basis Akrual, dikutip dari; <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3093-laporan-keuangan-desa-dari-basis-kas-menuju-basis-akrual.html>
- Sugiarti, Ekasari dan Yudianto, Ivan. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, PROCEEDINGS ISSN- 2252-3936*, hal 580-590